



**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI X DPR RI
DENGAN
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Nama Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Tahun Sidang : 2023-2024

Masa Persidangan : III (Tiga)

Rapat ke- : -

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Sifat Rapat :

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Januari 2024

Waktu : 10.27-12.44 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I DPR RI

Ketua Rapat : Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol./ Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP., M.H. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi X DPR RI

Acara : 1. Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023.
2. Tindak lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan.
3. Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai Amanat RDP 15 November 2023 sebagai bahan persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.

Hadir : **PIMPINAN :**

1. Dr. Dede Yusuf M. Effendi, ST. M.IPol.
2. Dr. H. Abdul Fikri Faqih.,M.M.

ANGGOTA :

F-PDI PERJUANGAN :

1. Rano Karno, S.IP.

F-P.GOLKAR :

1. Ferdiansyah,S.E.,M.M.

2. H. Muhammad Nur Purnamasidi

F-P.GERINDRA:

1. Ali Zamroni, S.Sos.
2. Ir.H.Nuroji
3. Dr.Ir.H. Sodik Mudjahid,M.Si.

F-P.NASDEM :

1. -

F-PKB :

1. Drs. H. Bisri Romly, M.M.

F-P.DEMOKRAT :

1. -

F-PKS :

1. Hj. Ledia Hanifa Amaliah.,S.Si.,M.Psi.
2. Dr.H.Fahmi Alaydroes.,M.M.,M.Ed.

F-PAN :

1. Dessy Ratnasari.,M.Si.,M.Psi.

F-PPP :

1. -

ANGGOTA YANG IZIN:

1. Puti Guntur Sukarno, S.IP. (F-PDIP)
2. Vanda Sarundajang (F-PDIP)
3. Moh Haerul Amri.,SP (F-NASDEM)
4. Prof.Dr.Zainuddin Maliki.,M.Si. (F-PAN)

UNDANGAN :

1. Plt. Kepala Perpunas RI (Endang Aminuddin Aziz):

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

**Seluruh Jajaran Eselon 1 dan Eselon II dari Perpusnas,
Para kawan-kawan Anggota Komisi X,**

Izin karena waktu sudah hampir 10.30, saya membuka rapat ini tapi sekaligus saya skors sambil menunggu yang lain 2 kali 5 menit.

Apakah bisa disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Jadi dengan demikian maka rapat kita buka dan kita skors sambil menunggu dan dilanjutkan nanti setelah 10 menit kemudian.

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

(RAPAT DIBUKA DAN DISKORS PUKUL 10.27 WIB)

Ada tambah pasukan kita hari ini sudah ada Pak Nuroji, Pak Nur, Pak Rano Karno, Pak Fahmi dan saya sendiri berarti sudah 1, 2, 3, 4, 5, 5 fraksi apakah boleh kita mulai?

(SKORS DIBUKA PUKUL 10.38 WIB)

Baik kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi,

Pak Amin yang kami hormati selamat datang,

Kami ucapkan selamat Pak atas jabatan barunya sebagai plt. Perpusnas yang saya dengar adalah dari Pak Syarif Bando memasuki masa pensiun ya. Jadi oleh karena itu dalam waktu yang tersisa di dalam pemerintahan saat ini kurang lebih sampai bulan Oktober, maka Plt sangat dibutuhkan terutama terkait dengan DIPA tahun 2024 yang akan segera kita laksanakan.

**Para Eselon I dan Eselon II yang kami hormati,
Kawan-kawan Komisi X yang kami hormati,**

Rapat kali ini adalah merupakannya merupakan realisasi program kerja dan anggaran tahun 2023 sampai akhir Desember 2023. Yang kedua tindak lanjut laporan panja peningkatan literasi dan tenaga perpustakaan. Yang kemudian yang terakhir adalah penyampaian DIPA tahun

anggaran 2024 sesuai amanat Rapat Dengar Pendapat 15 November 2023 sebagai bahan persiapan pengawasan dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024.

Apakah dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Dan untuk itu saya tawarkan sampai jam 12 kawan-kawan? Kebetulan jam 12 ini teman-teman Pak Nur akan datang jadi mau demo di sini. Jam 12 cukup ya? Dengan demikian maka rapat dinyatakan terbuka.

(RAPAT : SETUJU)

RDP hari ini merupakan amanat Pasal 98 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah termaksud melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Termaksud APBD dan peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi.

Atas dasar ketentuan yang telah kami bacakan rapat hari ini merupakan perwujudan amanat Undang-Undang MD3. Sesuai agenda yang pertama yaitu realisasi program kerja dan anggaran tahun anggaran 2023 sampai akhir Desember pada akhir Desember 2023 pada RDP tanggal 15 November, Perpunas RI menyampaikan bahwa realisasi anggaran APBN tahun anggaran 2023 sebesar 88,22% atau Rp630.128.080.909.00

Dengan perincian sestama dari pagu 220.614.676.000 realisasinya adalah 188.368.953.340 dengan nilai presentase 85,38%. Lalu Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Dan Jasa Informasi dari pagu 152.323.596.000 telah terealisasi 136.404.761.152 dengan realisasi 89,55%. Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan dari pagu 254.858.122.000 realisasi telah mencapai Rp228.430.004.667 atau sebesar 89,63%.

Unit kerja mandiri dari 45. 406.282.000 terealisasi Rp39.319.656.521 atau sebesar 86,60%. Dan unit pelaksana teknis dari 41.072.691.000 telah terealisasi 37.601.705.229 atau 91,55%. Sehingga total dari 714 miliar sekian terealisasi 630.125.080.909 atau 88,22%. Adapun realisasi program prioritas nasional sebesar 91,04% atau sebesar 335.234.440.215.

Pada kesempatan RDP hari ini Komisi X DPR RI, DPR RI ingin menanyakan mengenai realisasi program kerja dan Tahun Anggaran 2023 yang daya serapnya masih dibawah 7% pada November 2023 antara lain; alih aksara, alih bahasa dan pengkajian naskah kuno realisasi anggaran baru di 70,81%.

Kedua pembudayaan kegemaran membaca dan literasi realisasi anggaran 70,05%. Ketiga kebijakan deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan realisasi anggaran baru 14,40% jauh sekali ini. Kemudian

perpustakaan umum dan khusus yang difasilitasi baru 44,90%. Lalu perpustakaan umum yang dibina dan dikembangkan 67,47%, forum diskusi perpustakaan sekolah madrasah dan perguruan tinggi juga masih 51,73%.

Kebijakan pengembangan dan pembinaan kegemaran membaca dan literasi baru 29,39%. Layanan penyelenggaraan kearsipan baru 64,45%, layanan data dan informasi publik baru 58,07%, penyaluran dana dekonsentrasi baru 62,97%. Ini saya ingatkan ini adalah per November 2023 yang dilaporkan.

Sehingga kalau kita lihat di sini banyak sekali program-program yang belum berjalan padahal kemarin-kemarin kita berharap kalau misalnya kurang cepat menjalankannya bisa kita bantu untuk di daerah pemilihan masing-masing. Terkait catatan tersebut, catatan tersebut Komisi X DPR RI ingin mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai kendala pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,

Agenda kedua adalah tindak lanjut laporan panja peningkatan literasi dan tenaga perpustakaan beberapa rekomendasi Panja antara lain 1 Panja PLTP Komisi X DPR RI mendorong pemerintah dalam hal ini Perpustakaan RI untuk meninjau kembali Peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten Kota Terkait Persyaratan Pengadaan Lahan Oleh Pemerintah Kota.

Perlu kajian yang komprehensif mengenai bentuk layanan dan sarana prasarana perpustakaan di kota-kota yang padat penduduk yang tidak memiliki lahan yang cukup untuk pembangunan gedung perpustakaan. Dua, mendesak pemerintah dalam hal ini Kemendikbud Ristek RI dan Perpustakaan RI untuk menyelaraskan kebijakan standar perpustakaan sekolah untuk setiap jenjang pendidikan termasuk menjadikan kondisi sarana prasarana perpustakaan sekolah menjadi indikator penentu akreditasi sekolah. Sebagaimana yang kita ketahui banyak perpustakaan sekolah saat ini belum terawat dengan baik atau belum tersedia dengan baik.

Tiga mendesak pemerintah dalam hal ini Perpustakaan RI untuk mengevaluasi implementasi SK Kepala Perpustakaan RI 117 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Asesor Daerah Akreditasi Perpustakaan sebagai langkah awal untuk pemenuhan kebutuhan akreditasi perpustakaan di daerah. Empat, mendesak pemerintah untuk merevitalisasi gerakan literasi melalui; satu, perubahan paradigma literasi inklusi sosial yaitu gerakan literasi sebagai praksis sosial pendorong transformasi sosial ekonomi. Dua, penguatan tata kelola kelembagaan sinergi dan koordinasi dan tiga perluasan ruang lingkup secara holistik dan integratif dari hulu ke hilir.

Revitalisasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan gerakan literasi yang masif dan berkesinambungan. Berdasarkan rekomendasi panja tersebut Komisi X DPR RI ingin mengetahui sejauhmana tindak lanjut dari rekomendasi Panja Literasi Dan Tenaga Perpustakaan.

f

Bapak ibu hadirin yang kami hormati,

Agenda ketiga adalah penyampaian DIPA tahun anggaran 2024 sesuai amanat RDP tanggal 15 November 2023 sebagai bahan persiapan pengawasan dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024.

Penyampaian DIPA tahun anggaran 2024 juga merupakan amanat RDP tanggal 13 September 2023 angka 4 bahwa Perpusnas RI akan menyampaikan DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024 paling lambat 30 hari setelah undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 ditetapkan di Rapat Paripurna DPR RI.

DIPA TA 2024 merupakan salah satu dokumen yang akan digunakan Komisi X DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana amanat Pasal 227 ayat (3) Undang-Undang 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Berdasarkan amanat RDP tanggal 15 November 2023 Komisi X DPR RI menekankan kembali Perpusnas untuk menyerahkan DIPA TA 2024 setelah menerima dari Kemenkeu RI. DIPA tersebut akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun anggaran 2024.

Kenaikan anggaran pada tahun anggaran 2024 mendorong Komisi X DPR RI memberi catatan agar program kerja Perpusnas RI tahun anggaran 2024 lebih banyak difokuskan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Beberapa isu pengawasan dalam pelaksanaan program tahunan anggaran 2024 antara lain:

1. Taman bacaan masyarakat berstandar Perpusnas RI,
2. Peningkatan literasi melalui digitalisasi dalam bentuk kolaborasi dengan K/L lain,
3. Pemerataan pengembangan pelayanan perpustakaan di semua daerah dan,
4. Layanan cinema pustaka di perpustakaan umum daerah.

Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,

Sebelum menatap pengantar ini, kami ingin menyampaikan hasil temuan bidang perpustakaan saat kunjungan masa reses persidangan II tahun 2023-2024 yang dirumuskan dalam rekomendasi kepada Perpusnas untuk:

1. Meningkatkan pemerataan dan pemenuhan layanan perpustakaan melalui skema DAK guna mengatasi kendala fasilitas sarana teknologi informasi digital, bahan dan koleksi serta kesejahteraan tenaga perpustakaan.
2. Mengevaluasi dan menginventarisasi kondisi sarana layanan perpustakaan keliling yang dimiliki Perpusda atau Perpustakaan Daerah untuk selanjutnya dilakukan kajian yang bertujuan

melakukan revitalisasi sarana, layanan perpustakaan keliling atau mobil keliling atau kendaraan lain yang digunakan untuk layanan perpustakaan keliling.

3. Berkoordinasi dengan K/L terkait dan pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan literasi di antaranya dengan mengatasi persoalan kurangnya bahan bacaan di perpustakaan daerah.

Demikian catatan kami dalam RDP ini sebelum kepala oh maaf, untuk itu kami persilakan Pak Kepala Plt untuk bisa memberikan penjelasannya, paling tidak setengah jam nanti kita lanjutkan dengan diskusi.

Silakan Pak Amin.

PLT. KEPALA PERPUSNAS RI (ENDANG AMINUDDIN AZIZ):

Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,*

Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi X yang hadir pada kesempatan pagi, siang ini,

Izinkan saya sebagai Plt. Kepala Perpustakaan Nasional bersama dengan tim Perpustakaan hari ini hadir di ruang ini untuk menyampaikan apa penjelasan terhadap agenda yang tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan.

Namun saya perlu juga menyampaikan di awal perkenalan kalau biasanya saya ada di sini sebagai Kepala Badan Bahasa, kali ini sebagai Plt Kepala Perpustakaan Nasional yang ditugaskan sejak tanggal 29 November 2023 yang lalu.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Izin Pak yang menugaskan dari menteri atau dari Presiden langsung?

PLT. KEPALA PERPUSNAS RI (ENDANG AMINUDDIN AZIZ):

Dari Presiden.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Oh dari Presiden ya. Baik makasih Pak.

Sudah dari presiden, ya.

PLT. KEPALA PERPUSNAS RI (ENDANG AMINUDDIN AZIZ):

Bapak dan ibu sekalian,

Sesuai dengan surat dari Sekjen DPR bahwa RDP kali ini akan membahas 3 agenda utama yaitu; pertama terkait dengan realisasi program dan anggaran sampai akhir 2023, kemudian yang kedua tindak lanjut laporan Panja Peningkatan Literasi Dan Tenaga Perpustakaan dan yang ketiga penyampaian DIPA tahun anggaran 2024 sesuai amanat RDP 15 November 2023 sebagai bahan persiapan pengawasan dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024.

Beberapa bagian dari agenda ini khususnya tentang DIPA itu sudah pernah dibahas dan disampaikan langsung kepada Komisi X. Hal yang benar-benar baru tentu saja ada dua agenda yaitu; terkait dengan realisasi program dan anggaran sampai akhir Desember 2023 yang tadi dicatat sampai RDP tanggal 15 November 2023 itu baru 88%. Dan secara umum saya bisa laporkan bahwa sampai akhir tahun 2023 capaian realisasi anggaran dan program itu anggaran 99,16%. Dan nanti secara detail akan disampaikan oleh Plt Sestama.

Bapak dan Ibu sekalian,

Di slide sebelumnya, iya sebelum ini, yang awal, *nah* untuk sebelumnya iya untuk mengingatkan kembali tentang tugas utama dari Perpustakaan Nasional sesuai dengan Renstra tahun 2020-2024 iya, ada 2 program besar yang pertama terkait dengan peningkatan kecakapan atau kemampuan literasi masyarakat dan yang kedua terkait dengan peningkatan kegemaran atau budaya membaca di masyarakat, dengan target-target yang sudah ditetapkan sampai tahun 2024 ini.

Nah secara umum ya kedua sasaran strategis tersebut telah tertuang dalam aneka program dan itu nanti akan bisa dilihat pada halaman berikutnya. Namun saya bisa laporkan bahwa capaian program yang dua ini untuk IPLM Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat itu tercapai dengan angka 14,58 ya atau 64,48 poin dan ini naik sebanyak 1,03 dibandingkan tahun 2022.

Sedangkan kebiasaan membaca masyarakat dari tahun sebelumnya diperoleh poin sebesar 63,58 itu 2023 terjadi peningkatan sebanyak 3,19 poin sehingga menjadi 66,77 poin.

Nah ini apa baik IPLM maupun budaya baca kalau dibuat kategorinya ternyata ini masih dalam kategori sedang. *Nah* ini yang masih tetap akan menjadi tantangan pada tahun 2024 dan oleh karena itu apa yang nanti akan kami sampaikan pada bagian berikutnya terkait dengan rekomendasi Panja Tentang Literasi Dan Tenaga Perpustakaan, itu kami akan mencantumkan beberapa terobosan program tahun 2024 untuk meningkatkan apa indeks pembangunan literasi masyarakat dan juga budaya baca sebagaimana tadi rekomendasinya disampaikan oleh Pimpinan.

Bapak dan ibu sekalian,

Untuk mewujudkan program-program tersebut yang tadi saya sampaikan itu Perpustakaan diberi anggaran sebanyak 714,27 miliar dan nanti secara mendetail akan disampaikan oleh Ibu Plt Sestama dan program-program capaian dari masing-masing Eselon I juga nanti akan di sampaikan oleh Para Deputi.

Saya persilakan Ibu Plt Sestama, Ibu Ofy untuk menyampaikan postur anggaran untuk tahun 2023.

Silakan.

PLT. SESTAMA PERPUSNAS RI (OFY SOFIANA):

Baik.

*Bismillahirrohmanirohim,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*

Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi X DPR RI,

Kami laporkan bahwa pagu Perpustakaan Nasional tahun 2023 dimulai dengan adanya blokir anggaran. Jadi pagu anggaran Perpustakaan jumlah 723.040.000.000 pada saat keluar kami sudah diblokir karena ini memang ada pengadaan mobil dan dibintang.

Kemudian di tengah perjalanan Perpustakaan anggaran Perpustakaan Nasional juga terkena *automatic adjustment* sebanyak 53 miliar, dan pada Juli 2023 kami pun mendapat penghematan kembali. Karena memang ada penyesuaian belanja, di mana tidak ada lagi tukin ke-14 dan 13, sekaligus kami juga mengajukan usul pembukaan blokir tahap pertama.

Tahap pertama cair 28 miliar kemudian disusul dengan bulan September cair tahap kedua sebanyak 16 miliar sehingga sejumlah 53 miliar yang diblokir sudah kembali dan pagu akhir yang dilaksanakan di Perpustakaan Nasional tahun 2023 adalah 714 miliar koma 2.

Bapak Ibu yang kami hormati,

Realisasi per kegiatan tahun 2023 per belanja kalau melihat belanja pegawai realisasi ini 99,02% kemudian realisasi belanja barang 99,04% dan realisasi belanja modal 99,75% total realisasi capaiannya adalah 99,16%.

Jika dilihat per kegiatan per Eselon II di tahun 2023, seperti tadi yang disampaikan oleh pimpinan, unit-unit kerja yang pada saat November di bawah 70% 70% realisasinya. Alhamdulillah di akhir tahun 2023 semuanya sudah mencapai 90% semuanya dan secara akumulasi realisasi anggaran perpustakaan nasional adalah 99,16% dan masih ada sisa anggaran 6 miliar

ini terkait dengan kegiatan-kegiatan sisa layanan dan sisa tunjangan kinerja yang kami bayarkan sesuai dengan realitas di lapangan.

Kemudian untuk dekonsentrasi Bapak dan Ibu yang kami hormati, realisasi anggaran dekonsentrasi tahun 2023 pagunya adalah 12 miliar koma 2 realisasinya 11,7 atau 96% dengan rincian; kegiatan pembinaan administrasi keuangan 2,1. Kemudian *workshop* penggiat literasi daerah 4,7 pendataan perpustakaan 1,8 dan lomba perpustakaan sekolah 3,57 juta.

Daerahnya per provinsinya sudah saya kira sudah ada di bahan yang kami sampaikan, demikian Pak.

Terima kasih.

PLT. KEPALA PERPUSNAS RI (ENDANG AMINUDDIN AZIZ):

Baik terima kasih Bu Sestama.

Dan berikutnya saya persilakan Ibu Deputy 1 untuk menyampaikan secara lebih rinci terperinci untuk realisasi anggaran dan program di Kedeputusan 1.

Saya persilakan bu.

DEPUTI 1 BID. PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI (MARIANA GINTING):

Baik terima kasih Prof. Amin.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera buat kita semua,

Izinkan kami memaparkan terkait dengan sasaran program di mana di Kedeputusan 1 di mana sasaran programnya adalah terwujudnya layanan prima pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara.

Nah di sini kita sudah mencapai misalnya di dalam kepatuhan standar pelayanan publik target 82,0, *nah* realisasinya 85,71. Dan juga terkait dengan persentase peningkatan kunjungan perpustakaan ke Perpusnas dengan target 2,0 realisasi 5,75. Dan juga terkait dengan persentase peningkatan serah simpan karya cetak dan karya rekam dengan target 5 realisasi 5,43. Dan persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah nusantara dengan target 21,18 dan realisasi 22,08.

Dan juga Bapak Ibu yang kami hormati,

Terkait dengan realisasi keluaran per KRO atau Klasifikasi Rincian Output di mana di Kedeputian 1 ini ada 4 pusat yaitu; jasa informasi perpustakaan dan pengelolaan naskah nusantara tercapai ini 100% dan juga deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan juga capaiannya 100, 102,49%, pusat bibliografi dan pengolahan bahan perpustakaan capaiannya sekitar 102,62% dan satu lagi adalah pusat preservasi dan ahli media bahan perpustakaan dengan capaian juga 100%.

Mungkin itu Prof dari Kedeputian 1, jadi intinya kami dari Kedeputian 1 sudah tercapai semua sasaran yang akan disasar ya sudah 100% ada yang lebih malah ya.

Terima kasih prof.

PLT. KEPALA PERPUSNAS RI (ENDANG AMINUDDIN AZIZ):

Baik terima kasih Bu Deputi 1.

Berikutnya Pak Adin, Deputi 2 untuk menyampaikan realisasi program yang ada di Kedeputian 2.

Saya persilakan.

DEPUTI 2 BID. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN (ADIN BONDAR):

Baik terima kasih pimpinan.

Kami dari Kedeputian Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan sebagaimana di dalam Renstra Perpustakaan Nasional 2020-2024 bahwa Kedeputian 2 memiliki sasaran program yaitu; terwujudnya perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi.

Nah di dalam pencapaian sasaran ini ada 4 indikator, yang pertama adalah rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk dengan target 2023, 1 banding 13 tercapai 1 banding 11. *Nah* walaupun realisasi ini menurun ini tentu pencapaiannya meningkat, karena rasionya semakin sempit. Ini juga nanti akan kita kejar sesuai dengan standar UNESCO 1 banding 2 di mana per kapita penduduk buku diwajibkan 2 judul setiap 1 penduduk.

Yang kedua adalah rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk, oh ini juga tercapai 1 target 1 banding 17.000 menjadi 1 banding 16.694 dengan standar 1 orang Pustakawan melayani 2.500.

Yang ketiga adalah presentasi peningkatan perpustakaan sesuai standar dari target 22,39 tercapai 42,51. Kemudian indikator yang keempat tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat yaitu dari target 1,75%

menjadi 1,91% yaitu 1,19% penduduk Indonesia telah memanfaatkan perpustakaan setiap hari.

Di halaman 16 dari realisasi output yaitu di Kedepatian 2 ada 4 kegiatan strategis; yang pertama adalah standarisasi dan akreditasi perpustakaan tercapai 103,61%. Kemudian kegiatan kedua adalah pengembangan perpustakaan umum dan khusus tercapai 101,93%. Kegiatan ketiga pengembangan perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi 100% dan yang terakhir adalah kegiatan analisis perpustakaan pengembangan budaya baca dan literasi tercapai 100%.

Demikian pimpinan terima kasih.

PLT. KEPALA PERPUSNAS RI (ENDANG AMINUDDIN AZIZ):

Baik, terima kasih Pak Deputi.

Terkait dengan realisasi keluaran per KRO di Sekretariat Utama dan juga di Unit Kerja Mandiri dan UPT saya persilakan Bu Sestama.

PLT. SESTAMA PERPUSNAS RI (OFY SOFIANA):

Baik terima kasih Prof.

Bapak Ibu Pimpinan dan seluruh anggota Komisi X DPR RI,

Sasaran program untuk unit sekretariat utama adalah terwujudnya tata kelola dan manajemen Perpustakaan Nasional yang baik dan handal. Ada 4 indikator yang harus dicapai di Sekretariat Utama yang pertama adalah indeks reformasi birokrasi Perpusnas, ini target 2023 adalah 90. Namun sampai saat ini penilaian indeks reformasi birokrasi dikeluarkan oleh Kemenpan Rb belum keluar.

Kemudian yang kedua adalah indeks SPBE targetnya adalah 3,48 realisasinya 3,56 di atas dari yang ditetapkan. Kemudian opini BPK atas laporan keuangan Perpusnas, ini juga belum keluar dari BPK dan terakhir adalah indeks persepsi anti korupsi ini juga belum keluar dari KPK.

Nah terkait dengan realisasi keluaran per KRO di halaman di slide 17 bahwa keluaran untuk Sekretariat Utama alhamdulillah tercapai semuanya 100%. Malah ada yang melebihi untuk perencanaan keuangan Perpusnas tercapai 100%, kemudian Hukum Organisasi Kerjasama Dan Humas Perpustakaan Nasional 107,14%, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dan Umum Perpustakaan Nasional 100%.

Kemudian terkait untuk unit mandiri, untuk pendidikan dan latihan perpustakaan keluarannya alhamdulillah 100,19%, kemudian untuk pembinaan Pustakawan tercapai 100,37% dan pengelolaan data dan informasi ini ada dua karena di pengelolaan data dan informasi ada juga anggaran untuk dukungan

manajemen dan dua-duanya alhamdulillah tercapai 100%. Dan terakhir pengawasan intern Perpustakaan Nasional tercapai 100%.

Begitupun juga untuk pelaksana teknis baik yang ada di Bung Karno maupun Bung Hatta di Bukittinggi untuk upt perpustakaan Proklamator Bung Karno tercapai 100% baik yang dari dukungan manajemen maupun dari program teknis, begitupun juga di pengelolaan perpustakaan proklamator Bung Hatta tercapai 100%.

Terkait laporan DAK fisik sub bidang Perpustakaan Daerah Bapak dan Ibu seluruh anggota Komisi X DPR RI, bahwa pagu anggaran DAK fisik sub bidang perpustakaan tahun 2023 sebesar 525 miliar yang tersebar di 94 lokus baik di dinas perpustakaan provinsi, kabupaten maupun kota.

Ada menu 5 menu yaitu; pembangunan gedung, perluasan gedung, pengadaan perabot, pengadaan tik dan pengembangan koleksi. Terkait dengan realisasi di slide 22 untuk pagu dak fisik 525 miliar dan rencana kerja juga tercapai 525 miliar kontrak hanya 97% 509 miliar, penyaluran 96%.

Kalau melihat menu yang sudah terealisasi Bapak dan Ibu, ini ternyata masih ada 3. Ada 3 daerah yang gagal salur karena ini secara fisik mereka belum mencapai 90% sehingga gagal salur untuk tahap ketiga. Yaitu di Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Kepulauan Yapen dan satu daerah yang penyalurannya hanya 57,80% yaitu Kabupaten Poso ini terkait dengan menu perabot.

Barangkali itu, terima kasih.

PLT. KEPALA PERPUSNAS RI (ENDANG AMINUDDIN AZIZ):

Baik, terima kasih Bu Sestama.

Selanjutnya izinkan saya untuk melaporkan tindak lanjut dari rekomendasi panja tentang peningkatan literasi dan apa tenaga perpustakaan. Ada 5 rekomendasi yang kami terima dari panja, yang pertama terkait dengan apa dorongan dari Komisi X untuk meninjau kembali Peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 8 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten Kota.

Nah tindak lanjut yang kami ambil adalah kami merevisi peraturan itu dan sampai hari ini ya yang posisinya itu sudah disetujui untuk diundangkan berdasarkan surat dari Sekretariat Kabinet.

Nah kemudian apa yang menjadi apa, perubahan yang sangat signifikan yaitu tentang luas ya luas perpustakaan yang diungkap tadi. Sekarang ini yang dilakukan revisinya untuk tipe c, itu minimal harus ada 600 m² dan ini tampaknya mengatasi persoalan ketidaktersediaan lahan di kota-kota atau di wilayah yang memang tidak punya lahan yang cukup. Kalau tadinya kan memang sangat besar ya perbandingannya yaitu 0,08 m² per kapita, dan ini dengan hitungan luas meter persegi ini menjadi lebih rasional, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua ada desakan dari panja kepada pemerintah yaitu untuk menyelaraskan kebijakan standar perpustakaan sekolah untuk setiap jenjang pendidikan, termasuk menjadikan kondisi sarana prasarana perpustakaan menjadi indikator penentu akreditasi sekolah. *Nah* kami di Perpustakaan Nasional itu sudah melakukan koordinasi dengan Kemendikbudristek dan sebulan terakhir ini saya sebagai Plt, sudah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan kawan-kawan di BSKP dan tadi pagi juga saya bicara dengan Mas Nino untuk menyelaraskan masalah standar ini.

Dan *insyaallah* dalam waktu dekat kami sedang mencari waktu kapan untuk bertemu dan menyelaraskan berbagai macam standar. Jadi bukan hanya standar perpustakaan sekolah tapi juga terkait dengan standar Pustakawan. Kemudian apa standar perguruan tinggi juga itu akan kami bahas semua supaya nanti betul-betul komprehensif penyelesaiannya tidak sebagian-sebagian. Dan ini mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diselesaikan Pimpinan.

Kemudian yang ketiga ya terkait dengan perencanaan kebutuhan tenaga perpustakaan dalam formasi rekrutmen ASN, apakah itu PNS maupun P3K untuk tahun 2024. *Nah* kami di Perpustakaan Nasional telah menyusun proyeksi kebutuhan ini dan ini berdasarkan data yang diterima dari seluruh kabupaten kota kemudian juga dari apa namanya? Sekolah begitu kita juga mendapatkan data seperti itu dan perinciannya seperti tercantum di halaman ini di halaman 25.

Misalnya perpustakaan provinsi itu 530 orang, kabupaten kota ada 23.347 orang dan seterusnya sampai ke perpustakaan-perpustakaan di sekolah, dan bahkan juga ada perpustakaan khusus yang memerlukan tenaga perpustakaan Pustakawan sebanyak 4.154 orang. Dan untuk penyediaan tenaga Pustakawan di sekolah secara khusus begitu, saya minggu yang lalu berbicara dengan dirjen GTK, bagaimana ini masuk atau tidak nanti untuk rekrutmen melalui P3K. Karena itu adanya di ranah sekolah dan ini akan kami bicarakan dan ini akan kami usulkan ke Bappenas, Kemenkeu dan Kemenpan Rb. Itu yang ketiga.

Kemudian yang keempat terkait dengan jumlah tim asesor daerah untuk akreditasi perpustakaan. Memang salah satu keluhan yang disampaikan oleh perpustakaan di daerah ketika saya menjadi Plt, itu minimnya jumlah asesor. *Nah* oleh karena itu tahun ini ya, kami akan lebih melipat duakan ya, jumlah asesor pelatihan asesor, sehingga nanti ketika akan melakukan akreditasi itu akan jauh lebih banyak ya jumlah perpustakaan yang diakreditasi. Dan kami juga akan memperbaiki sistem atau instrumen untuk akreditasinya disesuaikan dengan standar-standar baru gitu. Mudah-mudahan kekurangan asesor ini akan bisa terpenuhi pada tahun 2024 ini.

Kemudian rekomendasi yang kelima terkait dengan penyelarasan program gerakan literasi dengan tiga usulan yang disampaikan oleh panja. *Nah* kami pada saat ini sedang melakukan penyelarasan program di internal Perpustakaan Nasional supaya betul-betul sinkron dengan apa yang dikerjakan oleh khususnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi,

karena saya di sana juga sebagai Kepala Badan Bahasa menangani masalah literasi ini dan juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain.

Beberapa waktu yang lalu juga sudah keluar Surat Keputusan dari Menteri Desa terkait dengan pembinaan TBM seperti yang tadi disampaikan oleh Pimpinan ketika membacakan pengantar. Dan yang apa, catatan kami ya selain dengan program-program yang ini masih masih dalam perumusan kami begitu, mudah-mudahan jumlah-jumlah untuk penyediaan buku kemudian teknologi informasi di Perpustakaan Desa yang langsung dirasakan oleh masyarakat desa dan para pegiat literasi di masyarakat, itu jumlahnya kami harapkan bisa jauh lebih banyak lagi begitu.

Semalam kami melakukan pertemuan ya untuk menghitung berapa kira-kira jumlah bantuan buku, misalnya untuk perpustakaan di desa ya kemudian juga untuk TBM-TBM. Mudah-mudahan dengan perhitungan baru ya dengan pendekatan baru menggalakkan program literasi dengan dukungan dari kementerian dan lembaga lain, itu akan lebih tercapai begitu targetnya lebih besar lagi.

Nah jadi itu yang kami lakukan ya penyisiran-penyisiran program dan tentu saja dukungan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di Komisi X untuk nanti sosialisasi program kami di desa terutama yang mencakupi seluruh kabupaten kota di Indonesia ini bisa semakin masif begitu. Karena apa tanpa dukungan yang kuat begitu dari Komisi X, ini tentu juga kami tidak bisa bekerja optimal begitu.

Saya pikir itu untuk yang terkait dengan apa, tindak lanjut dari panja dan bagian terakhir untuk DIPA tahun 2024 saya persilakan Ibu Sestama untuk menyampaikan secara sekilas, bagaimana ini perubahan dari apa RDP 2023 tanggal 15 November kemudian apa setelah sekarang 2024.

Saya persilakan Bu Plt. Sestama.

PLT. SESTAMA PERPUSNAS RI (OFY SOFIANA):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi X DPR RI,

Kami melaporkan bahwa pagu anggaran Perpustakaan tahun 2024 sebesar 725.830.194.000 kalau berdasarkan fungsi pendidikan 463,7 miliar, layanan umum 262,089 juta, kemudian kalau berdasarkan sumber dana 720,7 miliar dan PNBP 487,4 miliar. Sedangkan berdasarkan prioritas, prioritas nasional 379,8 miliar dan non prioritas nasional 341,3 miliar. Dan berdasarkan jenis belanja, belanja pegawai 148,90 juta dan belanja barang 484,6 juta dan belanja modal 93,1 miliar.

Sementara Bapak dan Ibu di waktu yang bersamaan bulan Januari awal Januari, kami juga mendapatkan surat dari Kementerian Keuangan anggaran 2024 juga terkena *automatic adjustment* sebesar 52,3 miliar.

Alokasi anggaran Perpustakaan tahun 2024 jika dibagi per program yang pertama kalau berdasarkan program perpustakaan dan literasi 463,7 miliar dan program dukungan manajemen sebesar 262 miliar. Pagu alokasi per unit Eselon 1, bisa saya sampaikan bahwa total anggaran Deputy 1 144,7 miliar dan UPT perpustakaan proklamator Bung Karno dan Bung Hatta sebesar 28,2 miliar.

Sementara untuk alokasi Deputy 2 dan 1 unit mandiri yaitu pusat pembinaan Pustakawan sebesar 281,6 miliar. Dan untuk alokasi Sekretariat Utama dan 3 unit mandiri itu 271,1 miliar dan kebetulan di Sekretariat Utama ini juga terkena blokir sejak awal 3 miliar 37 juta. Ini terkait dengan pengadaan kendaraan listrik dan dari pusat data dan informasi 2,6 ini terkait dengan *clearance* perangkat teknologi.

Selain itu Bapak dan Ibu, mohon izin kami juga melaporkan dekonsentrasi 2024 total pagu 11 miliar 479 juta yang tersebar di 33 lokus yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu; pembinaan administrasi keuangan 3,2 miliar, lomba-lomba 7,3 miliar dan pemetaan perpustakaan ada 887 juta.

Kemudian terkait dengan DAK fisik Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian, total anggaran pagu untuk DAK fisik adalah 525 miliar dan total pagu rencana kerja adalah 524,9 miliar yang tersebar di 107 lokus di dinas perpustakaan provinsi, kabupaten maupun kota. Dengan menu masih sama dengan yang tahun 2023 yaitu pembangunan gedung, perluasan gedung, renovasi gedung, pengadaan perabot, pengadaan tik dan pengembangan koleksi.

Barangkali itu, terima kasih.

PLT. KEPALA PERPUSNAS RI (ENDANG AMINUDDIN AZIZ):

Baik terima kasih Plt. Sestama dan demikian Pimpinan, apa yang bisa kami paparkan untuk 3 agenda yang apa, menjadi agenda RDP pada siang hari ini.

Terima kasih saya kembalikan.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Makasih Pak Amin.

Jadi kalau lihat dari paparan ini kelihatannya semua sudah mencapai 100% ya dalam waktu yang signifikan tuh dari November sampai akhir tahun cepat sekali loncat, tapi kita bersyukur kita apresiasi.

Ada beberapa catatan, kebetulan karena kita sebagai mitra ini, praktis di tahun 2023 ini kita belum pernah melakukan kerjasama kemitraan yang boleh dikatakan dirasakan di daerah pemilihan kecuali mungkin bantuan *supporting* buku ya. Mudah-mudahan tahun 2024 ini akan ada program-program yang berkaitan dengan literasi, gemar membaca dan lain-lain.

Saya persilakan kawan-kawan mungkin untuk memberikan tambahan ada Pak Nuroji, Pak Nur, Pak Fahmi.

Silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. NUROJI):

Ya, oh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Silakan Pak Nuroji.

F-P. GERINDRA (Ir. H. NUROJI):

Terima kasih pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Para Anggota,
Dan juga Pak Plt. Kepala Perpustakaan beserta seluruh jajaran,**

Selamat Pak menjadi Plt Perpustakaan. Dan saya pertama mengapresiasi capaian kerja dari Perpustakaan sudah cukup baik ya, ya seperti yang disampaikan tadi. Cuma ada beberapa kesimpulan mungkin yang ingin saya sampaikan.

Pertama terkait dengan tugas fungsi perpustakaan ini ya, meningkatkan budaya literasi dan tingkat kegemaran membaca, sementara di kebetulan Bapak juga Profesor Amin juga yang memimpin di lembaga buku atau perbukuan juga ada tugas itu ya. Dan di atasnya di tingkat kementerian bahwa Kementerian Pendidikan juga punya tugas fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sama di dalam perpustakaan juga fungsinya itu *men-support* tugas itu. Ini kaitannya dengan anggaran Pimpinan maksud saya. Selama perpustakaan ini menyendiri atau disendirikan ya, kita sulit sekali mendorong ya kenaikan anggaran yang signifikan. *Nah* maksud saya untuk mempermudah dorongan itu, kan di Dikbud itu anggaran cukup besar ya. Ini digabung saja ini badan buku dan perpustakaan, karena kan berurusan tugasnya apalagi sudah satu komando begini.

Jadi seperti tadi berat tugas perpustakaan sendiri DAK-nya saja 500 dari 700 miliar ya sisanya tinggal berapa ratus 200-an untuk program apa, untuk bisa membantu mengembangkan atau mengembangkan program-program baru. Sementara memang dibutuhkan bantuan pusat bagi daerah untuk mengembangkan perpustakaan itu. Karena itu makin tidak mungkin saja tugas-tugas perpustakaan ini akan maksimal memajukan tadi mencapai target budaya literasi dan gemar membaca ini.

Itu usulan, usulan ini saja, ya barangkali suatu saat bisa disampaikan ke Presiden atau Pak Menteri untuk mengadopsi kembali perpustakaan ke dalam bagian dikbud karena tugasnya juga sama. Supaya nanti kalau ada anggaran yang melimpah di sana dapat limpahan anggaran juga dari Dikbud, itu satu.

Yang kedua, bagaiman Pak Plt ini melihat fenomena toko-toko buku besar tutup ya. Sedangkan kita perlu didukung dalam memajukan budaya membaca ini. *Nah* distribusi buku salah satu distributor buku ya toko buku ya mereka mengalami kerugian atau sepi pengunjung pembeli sehingga banyak yang tutup.

Nah ini fenomena baru berlawanan dengan arah tadi kemajuan atau tingkat kegemaran membaca yang meningkat. *Nah* kalau udah kayak gini bagaimana posisinya jadinya? Sementara masyarakat sudah mulai gemar membaca, gemar membaca itu bisa melalui perpustakaan yang bukunya didapat dari pemerintah atau penerbit atau beli di toko dan juga melalui perorangan, perorangan yang gemar membaca tanpa harus datang perpustakaan.

Artinya yang perorangan ini yang tidak harus ke perpustakaan dia membeli buku. *Nah* ini yang menurut saya salah satu titik yang ber, dua arah yang berlawanan ya. Memang ada *online shop* ya buku-buku sekarang dijual di *online shop*, tapi apakah itu bisa memenuhi harapan masyarakat untuk bisa belanja buku. Karena masih banyak juga yang gaptek ya untuk belanja di online termasuk saya ini paling *nggak* bisa belanja online ya.

Ketiga terkait dengan Undang-Undang Perbukuan Nomor 3 Tahun 2017, sebenarnya ada kewajiban pemerintah, pemerintah pemerintah pusat ya untuk memberikan insentif fiskal kepada penerbit buku atau percetakan ...(rekaman terputus) pajak terhadap penerbit itu belum ada bahkan kalau kita nyetak buku ...(rekaman terputus) banyak buku-buku India yang *nggak* penting kertasnya bagus tapi isinya bagus-bagus. *Nah* itu juga belum dilakukan penerjemahan buku-buku asing yang mungkin kalau kita beli aslinya mahal, bisa dibeli oleh pemerintah. *Nah* ini juga belum berjalan amanat undang-undang ini.

Nah itu bisa tercapai apa namanya, tadi makin didorong untuk tingkat kegemaran membaca sekaligus juga meningkatkan budaya literasi. Saya melihat juga dalam hal percetakan tadi itu masih sangat-sangat biaya mahal, sehingga mungkin tadi biaya produksi penerbit itu mahal, kemudian harga buku mahal sehingga sepi pengunjung mungkin ada kaitannya dengan fenomena tadi buku-buku, toko buku tutup gitu.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Makasih, baik pak. Selanjutnya karena Pak Fahmi tadi datang duluan.

Pak Fahmi dulu silakan.

f

F-PKS (Dr. H. FAHMI ALAYDROES, M.M., Med.):

*Bismillahirrohmanirohim,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih pimpinan.

**Yang saya hormati teman-teman Anggota Komisi X,
Dan juga tentu saja yang saya hormati Prof. Amin Aziz selaku Plt. Kepala
Perpustakaan,
Beserta Ibu Sestama dan Ibu Bapak Deputi,**

Pertama tentu saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional atas capaian yang tadi saja kita sudah dengar, tadi kita sudah mendengarkan paparannya. Pertama daya serap yang cukup bagus ya hampir 100%. Walaupun tadi ada catatan sedikit dari November ke Desember nampaknya ada sedikit upaya-upaya yang perlu dijelaskan tapi tadi sudah kita dengarkan, sekali lagi terima kasih.

Nah yang kedua adalah capaian yang cukup signifikan pertumbuhan nilai budaya kegemaran membaca dari tahun 2020 ke 2023 nampak sekali pertumbuhannya, dan juga indeks pembangunan literasi masyarakat tahun 2023 juga nampak ada pertumbuhan. Itu yang perlu kita apresiasi tentu saja. Tapi ada beberapa catatan yang barangkali perlu saya sampaikan ke Bapak Kepala Perpustakaan dan jajaran.

Yang pertama adalah mengenai tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat per hari. Ini saya memandang apa yang sudah kita bangun, berbagai gedung perpustakaan dengan segala macam kelengkapannya, tentu pada akhirnya kita berharap semua gedung-gedung tersebut yang dibiayai oleh kita oleh negara harus berujung pada pemanfaatan, kalau tidak bermanfaat artinya mubazir gitu ya.

Nah ini titik kritis menurut saya bagaimana kita harus terus-menerus *monitoring*, mengevaluasi sejauh mana tingkat pemanfaatannya. Di sini disebutkan 2023 terealisasi 1,91%. Tadi saya bertanya-tanya apa maksudnya ini kok kecil sekali ternyata memang ini rasio perpustakaan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Betul ya begitu?

Lalu saya coba kutakatik angka ini dikaitkan dengan jumlah penduduk usia produktif kita, jadi kalau kita anggap bahwa penduduk produktif berdasarkan statistik itu ada 190 juta. Artinya usia produktif ini usia yang kita asumsikan mampu memanfaatkan perpustakaan untuk mereka berkarya tentu saja. Itu ternyata 1,91% itu berarti cuma 3,6 juta seluruh Indonesia, artinya jumlah penduduk yang memanfaatkan perpustakaan di seluruh Indonesia hanya 3,6 juta.

3,6 juta ini kalau kita coba lihat berdasarkan rata-rata per kota kabupaten, ada 514 kota kabupaten, lalu kira-kira setiap kota atau kabupaten itu hanya ada 7.000 penduduk setiap kota kabupaten rata-rata yang

memanfaatkan perpustakaan tersebut. Lalu saya coba proyeksikan ke kabupaten dahil saya di Kabupaten Bogor, di Kabupaten Bogor itu kira-kira usia produktif ada 4,2 juta. Jadi kalau kita lihat 7.000 kemudian dibandingkan dengan 4,2 juta ketemulah angka 0,17% saja yang memanfaatkan perpustakaan.

Apakah angka-angka ini memang seperti itu realitanya? Kami mohon pandangan Perpustakaan Nasional, jauh sekali ya artinya apa yang menjadi beban atau masalah pembangunan literasi kita, masih jauh dari apa yang kita capai, apa yang harus kita capai, itu yang pertama.

Kemudian yang berikutnya ini tentu berimbas pula pada pemanfaatan-pemanfaatan yang lain, masih dalam Bab manfaat. Saya juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang pemanfaatan naskah nusantara ya. Di slide ke-13 kalau *nggak* salah ini kan sasaran program duanya, “terwujudnya layanan prima pelestarian pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara”, tetapi di sini tidak ada angka pemanfaatan naskah nusantara. Yang ingin saya tanyakan kalau dalam konteks naskah nusantara ini seberapa jauh angka atau indeks pemanfaatannya dan kalau itu ada seperti apa sih gitu loh? Artinya naskah-naskah nusantara yang sudah kita kumpulkan, kita rawat lalu kira-kira pemanfaatannya sehingga menjadi sesuatu yang produktif terus gambaran seperti apa dan sejauh apa.

Kemudian yang berikutnya, Prof. Amin terkait dengan DAK fisik sub bidang perpustakaan daerah. Alhamdulillah tentu angka yang cukup kita syukuri 525 miliar tersebar di 94 tempat. Ya cuma sekedar ingin bertanya saja dari semua yang tersebar ini ada beberapa tempat yang menurut saya itu daerah yang cukup perlu dibantu. Kenapa jadi kecil, apakah memang tahun-tahun sebelumnya sudah dapat barangkali asumsi apa perkiraan saya seperti itu. Seperti Banten hanya 285 juta, kemudian Gorontalo tidak lebih dari 1 miliar hanya 812, Maluku 304, kemudian 304 juta ya kemudian Papua Barat 1,5 miliar, mungkin saya tidak tahu apakah tahun-tahun sebelumnya memang sudah dapat.

Kemudian yang terakhir Prof. Amin terkait dengan rekomendasi panja. Dari lima yang disampaikan tadi saya melihat, kalau *nggak* salah di panja itu ada rekomendasi dan sering disampaikan juga teman-teman di sini mengenai perlunya Perpustakaan Nasional untuk menggalang apa koordinasi, kolaborasi sinergi dengan berbagai pihak. Baik di kalangan pemerintah sendiri, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga dengan berbagai pihak.

Bagaimana Perpustakaan Nasional memandang hal itu seperti apa ke depan atau apa yang sudah terjadi dan apa yang akan disampaikan sedemikian rupa, sehingga *nah* sehingga. Kebetulan kemarin baru kami menyelenggarakan Webinar tentang literasi yang muncul adalah “bahwa perpustakaan nasional di Indonesia ini atau literasi di Indonesia ini masih belum mwujud menjadi sebuah gerakan”. Jadi lebih banyak kepada program-program tadi belum menjadi sebuah gerakan.

Padahal pasal pemajuan atau pembangunan literasi ini sudah berumur cukup panjang ya, bahkan mungkin 70 tahun lebih. Ketika dulu Presiden Soekarno pertama kali dengan gerakan apa pemberantasan buta huruf, kita sudah 78 tahun merdeka. Artinya harus terus-menerus diupayakan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah gerakan semesta. Artinya semua pihak dan ini terkait dengan sejauh mana kolaborasi koordinasi sinergi kepada seluruh *stakeholder* sehingga kita benar-benar dari tahun ke tahun terjadi upaya pengembangan pembangunan literasi, sehingga angkanya tidak tidak kecil seperti yang tadi saya gambarkan. Ya di tempat kami hanya 7.000 penduduk yang memanfaatkan perpustakaan, rata-ratanya seperti itu.

Kalau memang salah perlu dikoreksi tapi itulah pandangan saya bahwa pr kita dalam konteks pembangunan literasi itu masih sangat luar biasa banyak.

Demikian terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.PoI./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Ya terima kasih Pak Fahmi.

Berikutnya ke sini dulu Pak Nur Purnamasidi nanti setelah itu baru Kang Ferdi, kan belakangan tadi.

F-PG (H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI):

Oke izin senior.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan Anggota Komisi X yang saya hormati,
Plt. Perpusnas beserta seluruh jajaran yang saya hormati,**

Genap hampir lebih 4 tahun Pak Plt, kami Komisi X ini bermitra dengan Perpusnas nih sehingga dan saya 4 tahun ini pun tidak pindah-pindah di Komisi X dan juga di Banggar. Ada hal yang bersifat tetap yaitu anggarannya bersifat tetap Pak Prof, gitu-gitu lagi segitu aja tidak. Artinya kayaknya kalau kita berpikir untuk menambah anggaran untuk meningkatkan kinerja, saya sudah pada posisi agak kurang berharap di tahun 2024.

Karena itu menurut saya mumpung ini awal tahun 2024, perlu dilakukan langkah yang progresif terkait dengan program. Yang tadi disampaikan oleh Pak Fahmi itu perpustakaan menjadi arus utama gitu loh. Ini kan kalau kita boleh lihat itu perpustakaan menjadi sesuatu yang di pinggiran. Mungkin ya di emperan tidak di arus utama. Padahal kan tugasnya sangat luar biasa meningkatkan literasi.

Walaupun ya kalau berdasarkan ukuran-ukuran menurut saya ya sudah bagus, *nah* cuma kemudian secara secara fenomenanya kan kita tidak bisa melihat. Saya kalau ke perguruan tinggi nggak pernah diantar ke perpustakaan oleh profesornya, oleh doktornya kan gitu. Saya kunjungan pembagian PIP ke sekolah-sekolah di SD SMP SMA pun tidak ada. Jadi sebagai sebuah arus utama ini belum.

Nah menurut saya mumpung masih ada setahun lagi di tahun di periode di periode apa periode pemerintahan yang sekarang, tentu perlu dicari langkah menurut saya sudah biarkan saja anggaran sekian. Ya kita asumsikan anggaran bersifat tetap seperti yang disampaikan oleh teman-teman Perpunas, tapi kita buat skenario dalam bentuk program yang itu betul-betul sangat progresif Prof, sehingga ada *legacy*-nya lah dalam waktu setahun depannya ada *legacy* yang bisa kita apa kira-kira itu.

Nah saya juga masih memikirkan itu saya yakin di bidang perencanaan para deputi ini juga sudah banyak hadir di forum-forum tertentu, yang menurut saya itu rekomendasi yang bersifat progresif dalam bagaimana mendorong Perpunas sebagai sebuah arus utama itu menurut saya penting, sebelum tadi saran dari Pak Pak Nuroji ini kejadian gitu loh. Kalau saya sih tidak berharap saya tidak berharap Perpunas itu di-*merger* ke Kemendikbud saya tidak berharap. Saya tetap Perpunas itu harus menjadi lembaga sendiri.

Nah karena itu menurut saya setahun depan mari kita tunjukkan. Iya tahun 2024 maksud saya ya kan, setahun di depan ini mari kita tunjukkan. Apalagi tadi tantangannya kan tadi 500 miliar di daerahkan kan gitu, tersisa kurang lebih sekitar 200 sampai 300 miliar.

Nah ini anggaran yang kecil menurut saya, *nah* kalau kemudian tidak ada hal yang bersifat progresif dalam bentuk program, saya khawatir ya akan seperti seperti seperti ini juga *positioning*-nya. Saya berharap itu *nggak* terjadi di 2024 sehingga nanti kalau saya terpilih lagi di 2024, ini saya bisa ngawal lagi 5 tahun lagi ke depan untuk Perpunas.

Saya pikir itu terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.PoI./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Luar biasa Pak doanya Pak, jadi memang belakangan ini kawan-kawan sedang banyak fokus di dapil. Yang hadir nih kira-kira yang sudah 90% akan terpilih kembali nih kira-kira Pak, 10% nya nasib. Karena udah sering terjun ke masyarakat.

Jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Nur tadi kemungkinan bisa saja ada revisi anggaran, asal programnya sesuatu yang benar-benar dilakukan terobosan. Ini ide yang bagus kita revisi anggaran itu biasanya di bulan April ya. Ada usulan April untuk revisi anggaran selama masih Bapak

f

mungkin bisa diusulkan misalnya perbanyak kompetisi-kompetisi, sekarang ini kan generasi muda tuh senang dengan hal-hal yang berbau kompetisi.

Kang Ferdi silakan.

F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ya terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati pimpinan Komisi X,
Bapak Ibu Anggota Komisi X,
Saudara Kepala Perpustakaan Nasional Plt. Endang Amin,
Dan juga para pejabat di lingkungan Eselon 1, 2 dan seterusnya,**

Pertama-tama bisa tampil dulu mas data sebelum kita masuk materi hanya mengingatkan dan ini sudah capek ngingetin berapa kali. Mudah-mudahan dengan masuknya saudara Endang Amin sebagai Plt, ada membawa angin segar dan perubahan. Jadi kalau tidak membuat angin segar atau pembaharuan berarti ya percuma jadi Plt kan gitu itu umumnya.

Jadi ini coba kita petakan jumlah sekolah perpustakaan dan tenaga perpustakaan di sekolah ini bicara sekolah dulu belum bicara yang lain, 443.939 ini sumber dapodik kalau Saudara Endang Amin, oh ini salah datanya ya marahin saja orang Dikbudnya jangan marahin saya. Ini kan tanya orang Dikbud kenapa datanya kayak gitu. 443.939, *library*-nya 199.593 tenaga perpustakaannya 54.763, lanjut biar cepat ini sebagai pengantar.

Lanjut.

Nah gap perpustakaan sekolah, sekolahnya 443.939, *library*-nya 199 jadi masih ada sekolah yang belum mempunyai perpustakaan sekolah ini belum bicara kualitas ya baru bicara jumlah, kita belum bicara kualitas daripada perpustakaan itu sendiri. Ada gap-nya 244.342 jadi wajar saja literasi *nggak* akan angkat.

Karena apa? Ya belum nyampai 40% ini terjadi, jadi Saudara Plt. Tentu ini menjadi perhatian walaupun tadi katanya sudah koordinasi nanti kita pertanyakan lebih lanjut. Ini dapodik 2023.

Lanjut.

Gap jumlah tenaga perpustakaan, 54.000, jumlah *library*-nya 199.597, jumlah tenaga perpustakaannya 54.763. Dari jumlah *library* aja masih -144.834. ini yang juga harus diperhatikan jadi *punten-punten, lamun pangarsa ngejanten* Plt. *Lamun teu aya perubian* percuma jadi Plt-nya. *Hampunten itu nyarieus kitu*. Ini data sanes, jadi kalau mau nanya ini data ya sudah ini tadi bahasa planet Pak izin Pak supaya nanti langkung caket secara pribados.

Ini yang juga harus kita perhatikan gimana, gimana kita mau maju ya kan, tenaga perpustakaan, *nah* nanti lanjut abis ini. *Nah* ini kondisi idealnya, kondisi idealnya harus angkanya sama, *balance* semuanya. Ini problem lagi *nah* baik tutup kalau gitu, nanti kalau dilanjutin, saya cuma lanjutin lagi.

Kang Endang Amin *nggak* usah ngomong di Papua, di Garut saja cuma 10 kecamatan dan itu di bawah 40% yang punya perpustakaan sekolah. Di Garut, ini saya belum bicara kabupaten Tasik, kabupaten kota Tasik di Garut saja hanya 10 kecamatan yang punya perpustakaan sekolah itu yang cuma mencapai hampir oh kalau mau hitung persis 37%. Jadi yang sisanya belum punya.

Jadi tolong sampaikan sama BKSAP itu jangan mimpi bikin asn apa ulangi an, jangan mimpi bikin AN Assessment Nasional, ini kan salah satu penunjangnya perpustakaan. Literasi lengkap ya kan gitu, itu kan yang dipertanyakan di AN kan itu. Gimana mau bagus, ini aja *nggak* bagus.

Baik kalau gitu kita masuk ke anggaran, pertama utamanya kami menyampaikan apresiasi, tentu tadi mengingatkan sifatnya sebagai pengantar tapi juga sebagai mengapresiasi bahwa kalau apa benar adanya yang telah mencapai 99,16%. *Nah* ini kita harus apresiasi.

Hanya saja memang harus di bisa masih bisa dioptimalkan, di antaranya seperti hukum organisasi kerjasama dan hubungan masyarakat mesti ada tersisa lumayan kan 2,19%. Kemudian analisis perpustakaan pengembangan budaya baca dan literasi masih 4,28%, dan pengembangan perpustakaan umum dan khusus dekonsentrasi masih 4%. Jadi yang lain sudah di bawah 2% tapi yang ini masih di atas 2% daya serapnya. Tapi *nggak* papa tapi secara umum.

Kang Nandang coba lihat halaman 10, halaman 11, halaman dan seterusnya. Capaian tapi kerap kali di mitra kerja pun termasuk di Dikbud mungkin juga koreksi buat Kang Nandang di sebagai Kepala Badan Bahasa. Setiap kenaikan 1% itu pernah *nggak* dihitung dibutuhkan anggaran berapa?

Sehingga harus ada keberanian Kang Endang Amin sebagai Kepala Perpustakaan bicara kepada Saudara Menteri, "kalau saya tidak dikasih 2 triliun *nggak* akan jalan program perpustakaan nasional". Harus ada keberanian itu kalau gak ya jangan jadi plt kan gitu harus ada keberanian, naik 1 poin dibutuhkan halaman 10 sama juga setiap kenaikan 1 poin memberikan.

Jadi naik-naik itu, *nah* sebenarnya bisa naik lebih besar *nggak*? Bisa kalau anggarannya berapa, konsekuensi logisnya apa. Yang selama ini tidak diutarakan dan sama juga yang di telah disampaikan oleh Pak Nur dan juga tadi teman kami Pak dari Gerindra menyampaikan juga bahwa ini juga jangan akhirnya *business as usual* aja. Ya tergantung daripada kemampuan kita mendobrak.

Nah yang jadi juga pertanyaan ketika kita bicara implementasi anggaran Pak Pimpinan, ini jangan ya alhamdulillah di mana di perpustakaan nasional tidak terlalu ya tapi di Kemendikbud ini dikasih 100 miliar tercapai, dikasih 75 miliar tercapai. *Nah* tapi juga hati-hati nih temen-temen perpustakaan jangan ditambah anggarannya juga dikurangi tercapai *nggak* dikurangi tercapai, ini jangan sampai terjebak di situ. Buat apa dikasih segitu tercapai, dikasih segitu juga tercapai. Bahkan sarana bidang pendidikan melebihi target 109,4%.

Kemudian di akreditasi lembaga lebih realisasinya menjadi 107%. Ini artinya apa ada juga faktor yang menentukan bahwa anggaran juga tidak satu-satunya untuk mencapai sebuah target ya. Jadi anggaran tidak satu-satunya untuk mencapai sebuah target. Asal tentu ada kegiatan yang memang bisa dilakukan ya tentu di sini, yang mungkin lebih paham para teman-teman yang ada di perpustakaan nasional. Sarana bidang pendidikan 109%, jadi hal-hal itu sebagai contoh saja.

Selanjutnya, kita bicara tadi disampaikan oleh Kang Nandang pada halaman 24. Kami telah melakukan koordinasi dengan BKSAP, yah BKSAP, BKSP Badan Kerjasama Antar Parlemen bukan? Oh bukan BKSAP Badan Kerjasama Antar Parlemen oh bukan. Iya, saya mau tanya sejak jujur punya *nggak* rasa memiliki terhadap perpustakaan nasional orang-orang tersebut? Percuma Pak kalau *nggak* ada. Percuma Saudara Endang Amin berkoordinasi kalau dia tidak punya rasa memiliki. Tidak punya komitmen dan tidak punya konsistensi, omdo. Jadi komitmen dulu.

Seseorang akan dinilai daripada komitmennya untuk menjalankan apa yang telah dikomitmenkan yaitu konsistensi terhadap komitmen yang telah disepakati. Kan gitu saja, kalau saya menilai orang gitu dia komit *nggak*, komit, konsisten gak apa yang dikomitkan. Kalau *nggak*, berarti dia *nggak* ada artinya, tidak punya nilai, siap-siap saja meninggal *nggak* ada yang ngelayat kan gitu. Ya karena tidak punya komitmen dan tidak konsisten.

Nah oleh karena itu kenapa menyangkut tadi juga oleh Pak Nuroji disampaikan di undang-undang ini kan ada dua undang-undang yang terkait sekali, sebenarnya kalau dikaitkan saya ambil 2 undang-undang, Undang-Undang Perpustakaan itu sendiri dan Undang-Undang Sistem Perbukuan Nomor 3 Tahun 2017 kebetulan di sini Saudara Fikri dan saya sebagai Wakil Ketua Panja.

Nah ini kan jadi perhatian kita, apakah itu di jalankan *nggak* jadi hari ini juga saya mohon Kang Nandang sebagai Plt juga menyisir perintah undang-undang yang belum dijalankan, apa itu? *Nah* itu tadi yang disampaikan Kang Dede yaitu apa kita bisa melakukan revisi terhadap walaupun kita ketok yang menentukan anggaran kan dari komisi. Yang penting dalam program yang sama apa kegiatan yang bisa kita revisi untuk juga bisa menjalankan, di samping tentunya untuk persiapan di 2025.

Paling tidak ada *pilot project* untuk pembahasan anggaran 2025 karena periode ini ada juga yang ikut menentukan anggaran untuk tahun 2025 masih periode ini, karena kita akan berakhir 1 Oktober. Jadi ketok palunya pasti di bulan September untuk anggaran 2025. Itu yang harus dipastikan.

Nah oleh karena itu juga tidak ada salahnya juga untuk melihat kembali soal penjenjangan Pustakawan dan juga status, saya tolong dikoreksi dahulu katanya kalau Pustakawan harus PNS atau ASN. Sekarang kalau itu masih terus nah terus bagaimana kontribusi Masyarakat. Kalau di sekolah kan bisa guru swasta mendapatkan tunjangan profesi, kenapa *nggak* itu kita mulai juga dilihat tenaga pendidikan yaitu dalam konteks status Pustakawan.

Nah GTK, GTK punya ini gak rasa memiliki *nggak* Mbak Nununya itu, punya visi ke depan *nggak* gitu *nggak* kalau *nggak* percuma. Jadi percuma Kang Endang Amin berkoordinasi tahu juga tidak bisa membangun rasa memiliki di antara teman-teman Kang Endang Amin yang ada di Kemendikbud percuma, *nggak* usah koordinasi, jalan aja sendiri, roboh saja sendiri, bikin aja perekap sendiri, *nggak* usah koordinasi. Kalau tidak ada punya komitmen dan konsistensi. Itu yang kita nilai juga.

Sehingga perlu kiranya tahapan apakah juga disebut entah bahasanya pengelola tingkat terbawah kemudian ahli muda atau ahli terus kemudian ahli madya dan kemudian Pustakawan atau istilahnya apakah sampai ke Pustakawan Utama. Jadi penjenjangan juga jelas *like* lazimnya yang mungkin seperti dosen itu yang juga harus di.

Nah panja-panja ini yang direkomendasi pana kembali lagi, jadi ini kan juga terkait di internal maupun eksternal. Jadi Saudara Endang Amin sekali lagi percuma kalau tidak ada perubahan anda sebagai Plt, harus ada perubahan lebih baik terutama dengan mitra kalau tidak harus. Ya artinya kondisinya harus lebih baik dengan mitra dibandingkan yang lalu kalau tidak ya kehadiran Saudara Endang Amin percuma. Kenapa kan niat baik kita adalah melakukan perubahan, penempatan Saudara Endang Amin di sebagai Plt tentu harapannya adalah adanya perubahan yang lebih baik itu.

Oleh karena itu tidak ada salahnya supaya nanti kita kalau meninggal dikenang, kita tentu harus selalu melakukan perubahan yang signifikan dan itu terjadi kalau kita sudah tidak ada di dunia berarti dia ingat zaman Plt-nya Endang Amin terjadi perubahan yang radikan terhadap a, b, c, gitu dong, punya prestasi. Kalau *nggak* ada *nggak* diingat, biasa aja datar-datar aja.

Nah oleh karena itu Pimpinan, Pak Fikri dan Pak Dede ini boleh juga nih Pak, Pustakawan dapat. Jadi saya terinspirasi sebenarnya sudah kita lakukan 3 periode yang lalu, kita juga boleh melakukan penilaian terhadap mitra-mitra kita kan ini. Jadi nanti kita bikin asal acara ceremonialnya, mitra yang korporatif, *nah* misalnya Perpustakaan Nasional, paling jelek misalnya Kemendikbud gitu. Ya dong, kita bikin kan buat apa penghargaan kalau tidak dilakukan atau diterapkan dilakukan evaluasi.

Nah ini kami saran sebelum akhir periode boleh juga nanti di akhir periode kita Kang Dede, Kang Fikri, kita bikin penilaian terhadap mitra-mitra sampai Eselon 1. Kalau Bapak-Bapak tidak melakukan izinkanlah saya yang melakukan, untuk melakukan penilaian terhadap sifatnya kerjasama sebagai mitra bukan sebagai apa-apa tapi sebagai mitra terhadap selama ini kita bekerjasama 5 tahun bersama-sama.

Itu saja Pimpinan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tapi sampai kami sampaikan di sini dengan niat baik, niat tulus demi perbaikan yang lebih baik. Itu kiranya terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Waalaikumsalam.

Terima kasih Kang Ferdi.

Jadi ingin membuat akreditasi kemitraan *nggak* apa-apa tapi kita harus tanyakan dulu kepada yang lain kalau disetujui ya boleh kita bikin tetapi paling tidak usulan ini kita tampung.

Pak Fikri mungkin mau memberikan tambahan, Pak Karno? Oh Bang Rano silakan.

F-PDIP (RANO KARNO, S.IP.):

Terima kasih pak ketua.

Saya mungkin hanya ingin sedikit memberikan masukan dari pemikiran saya dari kemarin nih Pak. Kemarin setelah paripurna saya ini dikejar oleh teman-teman media, bertanya tentang pajak hiburan, mungkin *nggak* ada konteks dengan perpustakaan tapi saya lagi berfikir tadi pertanyaan dari Bang Roji banyak toko buku yang tutup sudah.

Nah saya *nggak* tahu apakah buku ini sudah termasuk juga pajak hiburan? Kalau kena juga Pak mungkin nanti orang semuanya berlari ke perpustakaan nasional karena toko buku akan tutup. *Nah* jadi memang tadi sebelum Bang Roji bertanya memang bukan diskusi saya, anggaran perpustakaan 700 sekian tapi 500 buat DAK, operasional cuma 200. Lama-lama tutup ini perpustakaan. *Nah* kalau perpustakaan tutup semakin bodoh bangsa ini.

Jadi tadi saya hanya berfikir bagaimana caranya agar perpustakaan ini punya kemampuan untuk meningkatkan anggaran, dipelajari juga nih Pak Plt apakah buku ini nanti masuk ke dalam pajak hiburan? Kan ini ada kertas, ada tinta, ada segala macam loh Pak.

Ini sekarang tadi saya nonton Inul Darastita lagi marah-marah, dia pajak hiburan 25% saja karokenya sepi Pak, sekarang naik 40%. Ini makin banyak yang tutup apalagi di Bali, ini bisa. Ya memang alasannya belum selesai tapi pajak hiburan naiknya luar biasa.

Jadi tadi saya sedang mengkias Pak Plt, ini gimana cara mengkias agar anggaran perpustakaan ini bisa meningkat. Kan harus ada haul pak, makanya kan tadi kan Pak Ferdi bilang ayo pak plt harus berani ambil, mungkin dengan pajak hiburan ini menjadi menjadi haul untuk saya *nggak* tahu coba nanti dipelajarin, saya *nggak* bukan saya *nggak* paham. Pengadaan buku perpustakaan ini tuh dari mana? Karena yang saya tahu Balai Pustaka itu udah mati suri.

Nah kalau besok misalnya pengadaan buku Perpustakaan Nasional dari perpustakaan atau dari percetakan yang komponen harga pajaknya naik, makin berkurang deh Pak anggarannya, anggaran kementerian apa namanya perpustakaan kita ini.

Jadi barangkali saya sejak tadi berfikir apa saya mau tanya, saya *nggak* mau tanya tentang realisasi program alhamdulillah sudah 99%, tindak lanjut panja peningkatan literasi sudah kita pahami. Kemudian penyampaian DIPA juga, cuman saya lagi berfikir benar seperti Pak Pur tadi 4 tahun saya jadi anggota di Komisi X ini anggarannya *nggak* naik-naik. Segini aja, tapi beban tugasnya luar biasa dan semuanya alhamdulillah mencapai target. Dikasih anggaran gede, target capai. *Nggak* dikasih, target capai, Pak Ferdi. Itu yang luar biasa.

Jadi barangkali saya cuma memberikan tambahan saja Pak, saya cuman khawatir kalau memang buku dilihat menjadi pajak hiburan, komponen dari mana saya *nggak* paham, ini bisa bahaya dunia dunia perpustakaan kita.

Mungkin itu saja tambahan saja, terima kasih pak ketua.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Baik, Pak Fikri. Saya perpanjang dulu waktu kira-kira setengah jam ya setuju?

(RAPAT : SETUJU)

F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH.):

Baik terima kasih Kang Dede Yusuf.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Prof. Endang Aminuddin Aziz Plt ya Pak, pejabat lillahi ta'ala ini,
Dan jajaran Perpunas,
Juga pimpinan dan anggota Komisi X yang saya hormati,**

f

Sebetulnya jangan-jangan akar masalah problematika banyak itu karena suka Plt dan Pj ini semuanya Plt, semua Pj yang *nggak* ada dinfinitif mengikuti ini mungkin eranya era buka *volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity*. Nah ini kayaknya ini pemerintahan kita suka Pj, semua pimpinan daerah juga Pj Pj.

Nah ini di Kemendikbud sangat suka Plt itu, yang itu kayaknya *nggak* tahu kritiknya Pak Ferdi *nggak* didengar ada berapa ratus gitu katanya eh puluh apa ratus, nah 26 Plt. Padahal ada aturan tentang Plt tapi juga ditabrak dan konon juga katanya sesuai dengan apa sesuai dengan aturan, Plt itu 3 bulan boleh diperpanjang 3 bulan lagi sehingga 6 bulan. Setelah itu terus harus ada yang definitif. Ini anu nih keluar dari konteks tapi jangan-jangan ini problematika awal sehingga setiap sektor ada problematika.

Saya tentu mengikuti, saya terima kasih Pak Prof Endang Aminuddin Aziz dan Perpunas secara keseluruhan karena ada tindak lanjut dari rekomendasi Panja PLTP, Panja Peningkatan Literasi Dan Tenaga Perpustakaan. Sungguh pun mungkin tidak mudah tapi diskusi kita pertama memang secara institusional ini nampaknya harus ada solusi.

Misalnya contoh Perpunas itu kalau di desa namanya TBM, Taman Bacaan Masyarakat yang membuat yang bikin apa namanya izin itu pemda lewat dinas pendidikan. Tapi yang *ngompeni* desa atau kemudian nanti nyari bukunya ke Perpunas, umpamanya begitu. Ini ndak ada rak minta juga mintanya ke Perpunas TBM ini otoritasnya tidak jelas.

Kemudian tadi Pak, eh Pak Ferdinya kemana nih, menyampaikan data lewat itu berdasarkan dapodik, nah dapodik kan berarti perpustakaan sekolah. Nah apakah bisa Perpunas menjangkau, membina dan sebagainya sampai ke perpustakaan sekolah? Ini kan juga ternyata diskusinya panjang di PLTP ini *nggak* ada ini susah.

Jadi ada perpustakaan yang ngaku bahwa bagus dapat apresiasi dari sana sini tapi ternyata perpustakaan jalan tapi padahal di sekolah, jadi ruangnya saja *nggak* ada, ruangnya saja *nggak* ada tapi ada pejabat pemangku perpustakaan di sekolah.

Jadi ini tadi Kang Dede Yusuf ini apa namanya itu, tadi Pak Ferdi anu perpustakaan sekolah iya, ini nyambung ndak dengan Perpunas. Ini bisa nyambung bisa *nggak*. Jadi *nggak* ada tidak terlalu terkait memang, ini yang perlu saya kira disambungkan bagaimana caranya. Sehingga perpustakaan sekolah itu juga ada yang mengakreditasi betul jelas dan saya berharap sih sebetulnya sinkronisasi aturan tadi nanti ada juga. Nah sinkronisasi itu semua sampai perguruan tinggi.

Betapa luar biasanya ketika Perpunas bersama Komisi X misalnya datang ke Australia itu disuguhinnya ke ANU Australian National University, kemudian ke Australian Library, National Library of Australia NLA, NLA, ANU terus satunya apa lupa. Tapi itu jadi sejajar, jadi setelah dari perguruan tinggi kemudian jadi nyambung satu dengan yang lain.

Nah ini apakah nyambung kalau kita datang ke Perpustakaan kemudian ke perguruan tinggi di sini, ini jangan-jangan *nggak* ada kaitan. Kalau itu betul-betul nyambung. Jadi bahkan petugasnya pun sama yang ngantar, yang ini, yang menjelaskan itu sama. ANU kemudian ke NLA tadi National eh National Library of Australia dan seterusnya itu.

Kemudian ini perpustakaan TBM ada perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, kemudian perpustakaan beda lagi. *Nah* ini yang kayaknya perpustakaan yang mengurus yang ketika *nggak* ada perpustakaan kemudian minta DAK ya itu. Tapi dia juga tidak ada tanggung jawab yang moral yang kuat untuk sampai bagaimana supaya sekolah-sekolah itu perpustakaan bagus, apa segala macam bahkan ada pustakawannya, juga *nggak* ada tanggung jawab itu. Ini dinas padahal sekarang sudah berubah jadi dinas, jadi Eselonnya sudah naik jadi Eselon 2, Eselon 2 bukan lagi kantor bukan lagi apa tapi sudah bagus tapi ya ndak efektif.

Jadi ini fenomena perpustakaan dari sisi institusional, nampaknya perlu diselesaikan diskusi bagaimana caranya ini. Jadi ketegasan otoritas di beberapa ini level. Paling ndak yang saya sebut desa, di sekolah dan di daerah.

Kemudian diskusi yang kedua adalah kondisi ini situasi apa situasional, kondisional, aktual yang sekarang ini tadi toko buku tutup, organisasi toko buku bubar, udah bubar ini udah. Komisi X mengundang *nggak* datang, kita tanya kenapa, udah bubar Pak *nggak* ada, *nggak* ada itu, itu organisasi toko buku. IKAPI juga datang Pak tapi mereka rata-rata mengeluh, karena rata-rata pegawainya tinggal 20 kira-kira sekitar itu. Itu ada rekamannya di sini saya kira anu.

Ini apakah keprihatinan apa tidak tapi faktanya begitu, sudah di Komisi X ini? Jadi ini IKAPI kembang kempis, pegawai hanya maksimal tadi disampaikan 20 orang dan sebagainya.

Nah kemudian ada kecenderungan ini kecenderungan baik atau kecenderungan jelek, baca sekarang lewat gawai, gawai itu HP lewat Tab dan seterusnya dan seterusnya. Ini nampaknya perlu analisa, perlu riset ini yang melakukan siapa ini BRIN apa Kemendikbud Ristek, kan ada risteknya. Kalau *nggak* dikaji betul, kita nanti salah arah, salah langkah juga. Jadi jangan-jangan ini peluang bukan hanya tantangan.

Nah cuman kita mana peluangnya? Karena ini kan berarti tidak perlu datang ke perpustakaan orang udah ada di sini tapi udah ada di tempatnya masing-masing tapi udah bisa baca gitu, yang problematikanya kan mungkin ada masalah-masalah konon katanya kata itu dari Gramedia di sini. Kemudian pokoknya nyampaikan paparan di sini bahwa orang Indonesia itu *nggak* tahu ini apakah survey atau apa ndak tahu, itu kalau baca beberapa pengumuman agak panjang ada 10 kata itu, itu udah bingung.

Dia mau contohkan ada di Bekasi itu ada jalan rusak kemudian pengumumannya terlalu panjang, sehingga salah tangkap. Padahal yang rusak itu di tempat itu tapi dia muter, orang muter gara-gara itu pengumumannya tidak efektif karena terlalu panjang, terlalu banyak. Jadi *nggak* tahu berapa kata itu sudah ndak bisa ditangkap oleh masyarakat Indonesia gara-gara itu gak tahan untuk baca terlalu panjang, tidak mudah untuk memahami.

Nah ini saya kira perlu analisa riset kondisi ini sekali lagi apa BRIN apa Kemendikbud Ristek atau apa jadi kondisi situasional tadi situasional tadi sekarang situasional kondisi situasional atau aktual ini perlu ada riset, tidak hanya diskusi saja, tidak hanya diomongkan saja.

Nanti mungkin kita akan juga nyampaikan kalau hasil Panja PLTP kan dalam bentuk ini rekomendasi begitu saja dan insan-insan. Nanti dinamikanya akan dibuat ditulis oleh tenaga ahli semuanya, mungkin dalam bentuk buku. Jadi nanti kita sampaikan segera ke Perpustakaan Nasional. Tapi sekali lagi itu juga tidak menjawab semua hanya mengungkap fakta, hanya mengungkap fakta dan diskusi-diskusi yang ada di sini jadi tidak seluruhnya menjawab.

Terakhir saya baru dari apa itu BURT mendapatkan apa namanya DIPA DPR kemudian ada apresiasi dari Perpusnas kepada DPR RI katanya yaitu tentang perpustakaan DPR gitu katanya. *Nah* ini saya kepingin anu tuh performa institusi pemerintah yang lain bagaimana tentang ini tentang perpustakaan ini? Hampir semua kementerian, hampir semua institusi itu ada perpustakaan. *Nah* ini performa mereka seperti apa.

Saya bahkan oh DPR begini kok dapat apresiasi dari Perpusnas. Kita aja malu katanya. Saya, Prof Endang mungkin anu saya ke kemarin dolan, dolan itu main, ulin ya, ulin, dolan ke apa UK dimana tuh Load of Representative apa pokoknya rumah adu parlemen di UK itu. Itu begitu masuk kiri kanannya buku semua, itu baru kemudian kita tunjukkan ini komisi, ini ruang diskusi apa segala macam. Jadi buku semua sama tokoh-tokoh yang ini tokohnya ditampilkan dalam bentuk apa patung, hanya kepalanya saja yang kita baru tahu bahwa teh yang ada di hotel itu ternyata itu teh Inggris katanya. Kalau begitu saya *nggak* minum itu karena saya pusatnya teh itu dari Tegal, ngapain apa ya ngapain itu apa namanya teh yang ada di hotel-hotel itu dan itu ternyata nama orang, namanya apa itu teh apa Pak? Itu English Breakfast, *nah* bukan nama aduh lupa.

Jadi nama tokoh itu ada semua itu di DPR di parlemen jadi tokoh-tokoh itu ada kemudian buku-buku itu buku-buku yang katanya hanya virtual seolah-olah buku juga ada. Tapi yang buku betulan juga ada. Artinya kalau kita mau pinjam atau baca itu ngambil juga ada di situ. Di DPR di parlemen, ini di sini *nggak* ada masuk ini DPR DPR Komisi X yang membidangi, yang membidangi apa pendidikan gak ada buku di luar *nggak* ada buku, masuk juga ada nya ya aksesoris sama ini cendramata. Ini karena mungkin dominan seniman dan dominan artis mungkin ya. Eh artis kok ke sini, artis dominan artis sehingga artistik gitu artistik. Tetapi tidak ndak menunjukkan bahwa di sini pusat pendidikan, pusat kajian dan sebagainya.

f

Saya kira ini, jadi yang terakhir itu performa institusi pemerintah ini karena saya tadi dapat apresiasi jadi DPR dapat apresiasi dari pemerintah dari Perpustakaan, gara-gara memang anu apa Ketua DPR memperhatikan perpustakaan DPR perpustakaan DPR padahal perpustakaan DPR ya begitu aja *nggak* ada ini apa-apa.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Walaikumsalam.

Saya mau nambahin *nggak* enak pak, tapi begini saja Pak Amin emang benar sih dari anggaran 790 sekian miliar 500-nya berupa DAK dan kita tahu setiap kita kunjungan itu kan satu daerah mendapat 10 miliar, 8 miliar, 10 miliar yang akhirnya jadinya hanya bangunan.

Memang ini format yang perlu kita rubah ke depan, kalau format kita adalah penyerapan anggaran 100% maka output-nya adalah anggaran terserap. Tapi kalau output kita adalah kita rubah *mindset*-nya output-nya adalah keinginan masyarakat untuk aktif membaca misalnya nih, maka program itu akan berubah otomatis, bagaimana caranya membuat orang kepengen datang membaca lebih banyak lagi.

Sebagai terakhir kami di Pasuruan itu perpustakaan desa itu meminta buku-buku yang kira-kira yang untuk petani untuk apa itu. Saya pikir ketika ada keinginan masyarakat untuk membaca tapi bukunya *nggak* ada, bangunannya bagus tapi bukunya *nggak* ada. *Nah* ini menurut saya perlu kita lakukan rangsangan, kita lakukan sebuah metode perubahan sehingga DAK itu tidak melulu hanya fisik. Karena kalau fisik dan akhirnya jadi semen dan batu. Tapi kalau dia berbentuk program kegiatan, ya mungkin yang sering kita lakukan bersama Badan Bahasa juga itu merangsang para penulis-penulis baru, merangsang para pembaca, merangsang akhirnya animo literasinya itu yang tergerak dan terjadi.

Nah ini 2024 saya pikir walaupun Bapak Plt namun ada kemungkinan kita bisa melakukan revisi terutama di sektor programnya. Benar sayang sekali dari 700 hampir berapa tadi 80%-nya mungkin hanya berbentuk DAK yang outputnya tidak menyebabkan angka literasinya itu menjadi menarik.

Oleh karena itu saya sih menawarkan saja nanti setelah DIPA ini kita terima ini kan nanti ada apa namanya secara simbolis DIPA itu akan diserahkan saya mengusulkan memang perlu kita meninjau kembali program-program unggulannya untuk 2024.

Mungkin itu saja Pak Amin karena saya takut kalau kita minta akreditasi pas mau diakreditasi pas mau diakreditasi, Pak Amin nya sudah bergeser lagi nanti jadi pejabat di tempat lain, jadi yang paling penting adalah ada semangat kita untuk komitmen melakukan perubahan, perubahan dan perbaikan Pak.

Bapak ibu yang kami hormati.

Saya pikir oh baik-baik, siap pak siap pak pembaharuan perubahan dan perbaikan.

Saya coba bacakan kesimpulan kita pada hari ini.

1. Perpustakaan RI menyampaikan bahwa realisasi anggaran APBN tahun anggaran 2023 sampai dengan akhir 2023 oh oke, realisasi anggaran TA 2023 sampai dengan akhir Desember 2023 adalah 99,16% atau 708.257.051.872 dengan rincian sebagai berikut; pagu belanja pegawai 134.456.455.000, belanja barang 457.804.426.000 dan belanja modal 122.012.446.000. Sementara realisasi belanja pegawai 133.140.204.337, belanja barang 453.415.355.756, belanja modal ada 121.701.491.770.
2. Komisi X mengapresiasi Perpustakaan RI yang telah menindaklanjuti rekomendasi panja peningkatan literasi dan tenaga perpustakaan.
3. Perpustakaan RI menyampaikan dipa penyampaian DIPA anggaran tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - Alokasi anggaran Perpustakaan RI tahun anggaran 2024 per program program Perpustakaan Nasional RI total 725.830.194.000, program perpustakaan dan literasi 463.7 miliar eh juta nih ya? Miliar ya? 473.740.424.000, program dukungan manajemen 262.089.770.000.
 - Per unit kerja Sekretariat Utama 231.233.499.000, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Dan Jasa Informasi 144.797.381.000, Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan 275.326.305.000, Unit Kerja Mandiri 46.214.131.000, Unit Pelaksana Teknis 28.258.878.000.
 - Sehingga total menjadi 725.830.194.000
4. Komisi X mendorong Perpustakaan RI untuk:
 - a. Terus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Kemendikbud Ristek RI terkait kebijakan yang mengatur mengenai perpustakaan diantaranya perpustakaan daerah, perpustakaan desa dan sekolah taman bacaan masyarakat.
 - c. Meningkatkan rasio pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat usia produktif.
 - d. Menjadikan peningkatan literasi sebagai gerakan bukan sekedar program.
 - e. Menjalankan amanat pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan yang belum terlaksana.

Oke silakan mungkin anggota, kawan-kawan yang ingin menambahkan, Kang Ferdi.

F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Kang dede sebagai anggota saya klarifikasi pengertian DIPA biar sama, kan namanya Daftar Isian Pelaksanaan kalau itu yang disampaikan itu bukan DIPA, itu sama juga kita pembahasan anggaran kita ketok. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Jadi ada harus lebih rinci.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Ya apakah ada buku yang mau disampaikan *nggak* Pak, hari ini? *nggak* ada?

F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Harusnya ada, kan DIPA itu kan diserahkan. Kan harusnya ada, tolong di kita lihat dulu di google apa sih Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran berarti kan ada kegiatannya ngapain, perpustakaan daerah dan literasi isi kegiatannya apa, di mana, kan harusnya ada itu.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Oke maksudnya harus ada *hard copy* yang diserahkan sih. Tapi ini sudah indikatif belum, belum ya? Masih definitif kan?

F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Definitif, sudah definitif, sudah definitif cuma maksudnya kalau pengertian DIPA yang kita, yang saya pahami adalah tahu kan singkatan DIPA kan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Pelaksanaan jadi rinciannya harus ada. Jadi ini walaupun.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Paling ditambahkan saja Kang Ferdi ya untuk di.

F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Belum kita terima kan rinciannya? Isian pelaksana kan ya anggaran kan ada per program, nanti abis kalau dari awal kan per fungsi, sub fungsi, program, sub program, *nah* abis itu kegiatan dan sub kegiatan harus ada.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Baik, baik, baik, kita tambahkan usulan Kang Ferdi sangat baik yaitu kita meminta DIPA dalam bentuk fisik diserahkan paling lambat.

f

F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Saya ulangi, daftar jadi bukan fisik nya saja tadi isiannya itu daripada pelaksanaan anggaran belum kita terima intinya itu. Kalau yang ini kan sama juga yang kita ketok, kita tandatangani.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Belom-belom, belom.

F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Sudah pak, itu definitif itu sama juga kita setuju waktu 2023 pada bulan September sama isinya program, per program itu. Tidak ada perbedaan.

PLT. KEPALA PERPUSNAS RI (ENDANG AMINUDDIN AZIZ):

Izin, saya Pak Ketua.

Seperti tadi dalam pengantar saya sampaikan bahwa daftar program dengan anggaran itu sudah kita sampaikan dan ini sudah mendapatkan persetujuan. Jadi anggaran yang tadi jumlahnya 725.830.194.000 itu sudah menjadi pagu definitif, sudah dan itu sudah ada program-programnya untuk dilaksanakan pada tahun 2024. Dan ini sudah pernah disampaikan sebelumnya. Betul sudah.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Oh ya November ya, oh iya. Jadi bulan november itu sudah ada penyampaian pagu definitifnya. Waktu itu sudah kan ya dalam bentuk, semuanya sudah tertuang? Coba cek dulu.

F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Jadi saya bawa klarifikasi melalui pimpinan. Jadi kan tiap tahun itu kan Kemenkeu kasih DIPA ke setiap K/L yang sudah di-oke-kan Kemenkeu. Jadi kan gini alurnya supaya ngerti nih semuanya. Satu ketika kita ketok kasih Banggar, banggar kirim ke pemerintah, pemerintah membuat namanya rincian daripada pelaksanaan anggaran. Karena kita dibatasi berdasarkan keputusan MK membatasi pada posisi program dan kegiatan, tidak tahu penempatannya. Misalnya DAK 1 miliar untuk kabupaten Bandung, *nggak* ada, kita *nggak* ngerti tuh itu terlaksana setelah kita ketok, pemerintah buat, keluarlah harusnya per 1 Desember atau paling lama per 1 Januari itu keluar DIPA. Dimana DAK-nya dapat se Kabupaten Bandung 3 miliar, kabupaten Tegal 2 miliar itu namanya daftar isian pelaksanaan anggaran. Itu yang belum ada, nanti kegiatan program apa sub programnya apa.

Misalnya tadi coba ulangin saya bisa jelasin. Coba tolong dikebawahin, sekretariat. *Nah* ini kan per program, nanti per unit kerja, program perpustakaan nasional ya kan ya itu program perpustakaan nasional dan literasi. Isinya apa saja? Sub programnya? Kan abis program, sub program, coba deh buka di untuk pembuatan RKAKL kan ada standarnya tuh di PP berapa tuh saya lupa udah berubah berapa kali tuh.

Nah dari situ turun lagi *nah* akhirnya nanti dijatuhkan ke satker, satker nanti per mungkin di sini Eselon 2 nya, *nah* itu harus, *nah* itu kan ketika kita bahas kan *nggak* tau detilnya itu. Misalnya oh iya kegiatan belajar gemar membacadi 300 titik, 300 titik diarahkan ke mana, di kabupaten a, b, c, d itu namanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran gitu.

Jadi saya rasa untuk memperisngkat waktu pimpinan supaya *nggak* berlama-lama karena perpustakaan mitra yang cukup korporatif lah. Jadi kita belum terima DIPA atau rincian DIPA aja.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Baik, gini kang ferdi, rupanya memang ini sudah di-*share soft copy* Pak dalam bentuk ya dikirim ibaratnya *by* WA memang kita *share* tapi kan ini tidak menjadi berita acara, akan menjadi berita acara itu kalau penyerahan DIPA-nya ada.

Jadi oleh karena itu memang secara resmi harus ada penyerahan DIPA, Pak Fikri tadi baru saja mendapatkan DIPA tahun anggaran untuk Komisi X itu ada penyerahan tentangannya Pak satu buku beserta rencana kerja. *Nah* ini yang menurut saya gak mungkin, *nggak* mungkin kita hanya *share* kepada anggota melalui WA. Jadi saya butuh ada semacam berita acara penyerahan DIPA.

Nah itu silakan nanti disiapkan ya, syukur-syukur hari ini ada itu perlu diserahkan supaya apa? Supaya kita jelas bahwa yang diserahkan ini bukan hanya satuan satu tok kayak begini nih satuan saja. Paling tidak kita bisa mendapatkan keterangan terkait program-program apa yang akan dilakukan. Bisa ditambahkan saja di sini ya, di poin 3 di bawah Perpunas RI menyampaikan apa ini namanya ya, dengan isian sebagai berikut namun nanti di bawahnya lagi ditulis, namun *nah* tetapi belum menyerahkan *nah* rincian DIPA berupa ya udah rincian DIPA aja lah ya, rincian DIPA 2024 kepada Komisi X. ya boleh *softcopy* dan *hardcopy*. Ini ada ini dikirim di WA group cuman kayaknya *nggak* mungkin kita ngebuka DIPA di WA group harusnya memang berbentuk buku.

Nah nanti ditulis di sini paling lambat ya di bawah nanti ya paling lambat bisanya kapan Pak Amin kira-kira? Sestama? *Nah* ini Pak ini satu contoh tiap komisi dalam penyerahan DIPA ini selalu dapat seperti ini. Berikut ya seperti ini ya kira-kira gitu lah. *Nah* kita pengennya ada penyerahan resmi kepada kami apalagi kalau perpustakaan itu nyetak buku cuma 50 orang sih rasanya *nggak* terlalu sulit gitu ya. Kira-kira begitu Pak.

f

F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Mungkin catatan Pak Dede dan harus dibuat Pak Dede izin tambahannya, harus diberikan kepada karena setiap anggota punya hak politik jadi berikan kepada setiap anggota Komisi X jadi *nggak* bisa di Sekretariat saja. Jadi harus diberikan kepada setiap anggota.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Jadi disiapkan saja 55 anggota berikut pimpinan masing-masing mendapatkan DIPA *hardcopy*, paling lambat Bu Sestama kira-kira bisa berapa lama?

PLT. SESTAMA PERPUSNAS RI (OFY SOFIANA):

Satu minggu ya Pak, *insyaallah*.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Satu minggu ya?

PLT. SESTAMA PERPUSNAS RI (OFY SOFIANA):

Betul *insyaallah*.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Kita akan masuk kembali di hari Selasa kalau bisa disempatkan hari Selasa penyerahan DIPA ya, penyerahan dipa dalam bentuk itu tadi *softcopy* nya ada, *hardcopy*-nya ada. Supaya kita tidak hanya menyetujui bentuknya hanya seperti apa namanya usulan angka saja tapi kita jelas tadi di DAK-nya di mana, kabupaten apa, programnya apa. Sehingga bisa kita kawal kalau datang ke daerah kita tahu bahwa daerah ini mendapatkan *support* ini, *support* ini dan sebagainya.

Baik ada tambahan lain Kang Ferdi, Pak Nur, Pak Nuroji, Pak Fikri?

Silakan pak amin.

PLT. KEPALA PERPUSNAS RI (ENDANG AMINUDDIN AZIZ):

Baik.

Terima kasih pimpinan dan Bapak-Bapak Para Anggota Komisi X.

Walaupun tadi saya tidak diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang apa yang ditanyakan.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Boleh Pak boleh Pak, cuma soalnya tadi saya melihat waktunya lupa Pak, ini gara-gara DIPA.

Baik 10 menit Pak buat Bapak menjelaskan.

PLT. KEPALA PERPUSNAS RI (ENDANG AMINUDDIN AZIZ):

Baik.

Saya yang pertama ingin sedikit mengoreksi ini terkait dengan anggaran yang dimiliki oleh Perpustakaan dan DAK, jadi yang dak 525 miliar itu sebetulnya di luar anggaran yang 725 Pak. Jadi itu tidak, tidak mengurangi anggaran yang di Perpustakaan sendiri gitu. Tidak karena itu langsung ke sana jadi kita tidak ini.

Kemudian yang kedua terkait dengan apa program yang mungkin bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai terobosan itu, tadi saya sudah sampaikan yaitu nanti penjelasan yang lainnya bisa menyusul. Saya menargetkan semua TBM kemudian perpustakaan desa itu pada tahun ini Pak mudah-mudahan bisa sampai 10.000 perpustakaan di seluruh Indonesia ini dari jumlah desa sekitar 80 ribuan itu sudah memiliki perpustakaan desa. Yang akan kami bantu itu adalah berupa bukunya.

Nah kalau Kemendikbud kemarin itu kan intervensinya ke sekolah, karena Perpustakaan ini tidak bisa intervensi ke sekolah maka kami intervensinya ke desa ke kecamatan gitu ya di sana. Dan itu harapan kami kalau anggarannya memungkinkan itu 1 desa atau 1 TBM itu akan mendapatkan buku sekitar 1.000 judul buku. Gitu jadi tujuannya adalah supaya kelangkaan buku di desa itu bisa dipenuhi dengan disediakan buku melalui perpustakaan desa. *Nah* ini harapan yang apa kami canangkan pada tahun 2024 ini bisa terjadi.

Kemudian untuk yang apa.

F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Pak Dede izin, saya mau klarifikasi ke Kang Endang, ini desa atau kelurahan apa desa saja?

PLT. KEPALA PERPUSNAS RI (ENDANG AMINUDDIN AZIZ):

Desa atau kelurahan.

F-P. GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Desa dan kelurahan?

PLT. KEPALA PERPUSNAS RI (ENDANG AMINUDDIN AZIZ):

Iya.

F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Berarti totalnya 88.000 tuh, udah siap tuh sisa dari yang sudah dikurangi totalnya 88.000 kan, ini klarifikasi saja.

PLT. KEPALA PERPUSNAS RI (ENDANG AMINUDDIN AZIZ):

Iya yang jumlahnya kan segitu ya 88 ribuan, *nah* tahun ini sebelumnya kan tidak ada ya bantuan yang seperti ini langsung ke perpustakaan desa, kelurahan, TBM gitu. *Nah* tahun ini kami menginisiasi akan ada program penyediaan buku mudah-mudahan ya ini karena masih dalam perhitungan nih Kang Ferdi, mudah-mudahan bisa sampai 10.000 angkanya gitu tergantung kepada apa kekuatan anggaran kita.

Karena desa itu kan ada yang di daerah 3T, ada yang di kota gitu ya kalau kelurahan-kelurahan nah ini akan kami hitung kembali, tadinya tidak ada program ini, tapi karena ada termasuk di antaranya rekomendasi dari panja untuk memberdayakan tadi komunitas, memberdayakan pemangku kepentingan di daerah supaya minat baca masyarakat itu naik maka kami melakukan perubahan ya apa orientasi gitu untuk menyediakan buku lebih banyak.

Kemudian juga pembinaan pustakawan pengelolaannya gitu ya, apakah itu di desa maupun di TBM itu akan kami lakukan secara berjenjang begitu ya, ada nanti pembinaan bagaimana pemanfaatan buku yang kami kirimkan itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah selesai perhitungannya sehingga bisa kami apa, kami lelang begitu pengadaannya dan bisa segera dikirimkan ke perpustakaan-perpustakaan yang akan dibangun di desa atau kelurahan atau di TBM begitu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu program terobosan gitu ya yang membantu masyarakat di desa bisa membaca secara luas begitu.

Itu yang kedua kemudian yang ketiga terkait dengan tadi yang disampaikan datanya oleh Pak Ustad Fahmi, kemudian apa juga yang lain gitu tentang apa minat baca yang masih pemanfaatan perpustakaan yang masih rendah gitu. Ini memang tantangan tersendiri dan nyatanya adalah hasil analisis kami bukan minat bacanya yang rendah tapi ketersediaan buku yang masih sangat kurang. Oleh karena itu kami intervensinya melalui penyediaan buku begitu.

Dan ujungnya terima kasih ini atas saran-saran masukan ya yang disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi X yang terhormat, mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi kami untuk selalu apa, memberikan jalan yang lebih baik begitu dari waktu ke waktu di dalam meningkatkan kecakapan literasi masyarakat dan kegemaran membaca anggota masyarakat.

Demikian Pak Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Saya pikir ada harapan ini kalau sudah ada penyerahan 10.000 desa ini akan sangat bagus ya desa dan kelurahan. Artinya tiap tahun pasti ada aktivitas di masyarakat kan dan mudah-mudahan itu juga bisa kita kawal, Pak Nur nanti di dapilnya bisa mengawal ya. Kalau selama ini kan kita *nggak* pernah tahu pak perpustakaan bikin apa kita *nggak* pernah tahu. Jadi saya pikir mudah-mudahan 2024 satu apa satu program yang bisa kita kawal bersama sehingga tepat sasaran.

Ada tambahan lain mengenai kesimpulan? Pak Amin? Cukup ya? Teman-teman? Cukup baik. Pak Fikri cukup? Baik.

(RAPAT : SETUJU)

Dengan demikian maka sekali lagi kita sudah membuat suatu kesimpulan dengan catatan bahwa DIPA secara fisik dan *softcopy* akan diberikan kepada para per anggota paling lambat minggu depan pada hari Selasa.

Baik, takut terlewatkan lagi saya persilakan, Pak Amin untuk memberikan kata penutup.

PLT. KEPALA PERPUSNAS RI (ENDANG AMINUDDIN AZIZ):

Baik. Pertama saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi ya terima kasih kepada Pimpinan Sidang dan Para Anggota yang telah menyampaikan masukan, saran, kritik yang sangat baik bagi kami begitu dan kami beserta seluruh jajaran di Perpustakaan ya walaupun dalam kapasitasnya sebagai Plt. Mudah-mudahan memberikan kebaikan bagi semuanya dan *insyaallah* kita bisa terus berkolaborasi untuk mewujudkan program-program pada tahun 2024 ini.

Demikian terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Amin, tapi ini amin yang ini maksudnya Pak. Oke, baik.

Bapak ibu yang kami hormati,

Demikian maka kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah.

Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.44 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

**DADANG PRAYITNA, S.IP., M.H.
NIP. 196708061990031003**